

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

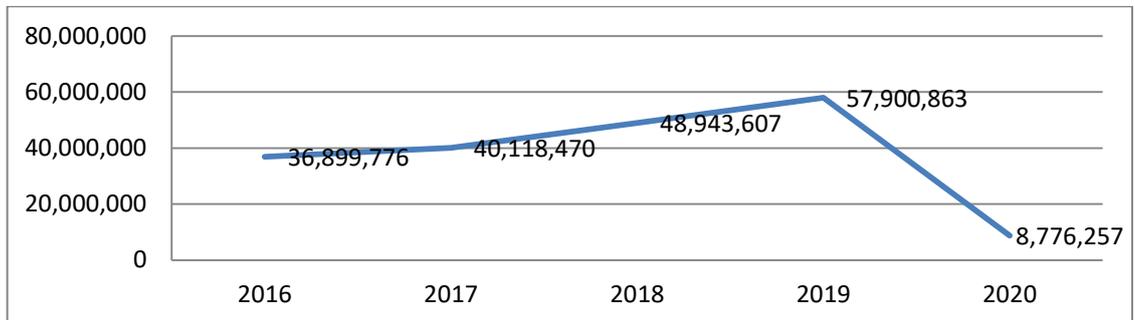
Pada saat ini Pemerintah Republik Indonesia menggugulkan sektor pariwisata dalam memperoleh devisa negara dikarenakan sebagai salah sektor yang berpengaruh dalam pengembangan negara. Kunjungan wisatawan asing yang begitu banyak ke Indonesia mengakibatkan tambahan devisa negara dari industri wisata sehingga mengakibatkan terjadinya wisatawan masuk ke dalam negara dan akan menambah valuta asing negara. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan merupakan bentuk tindakan berkaitan dengan kepariwisataan difokuskan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional sehingga terjadi peningkatan untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, mendorong pembangunan suatu daerah, mendayagunakan dan memperkenalkan objek wisata, menyediakan, memperluas, dan memberikan kesempatan secara luas untuk lapangan kerja, serta meningkatkan sifat patriotisme dan selalu bangga dengan negaranya serta mempererat tali persaudaraan antarbangsa. Sehingga dapat diartikan pariwisata merupakan bentuk suatu proses kepergian individu atau kelompok menuju ke tempat yang berbeda.

Pembangunan sektor pariwisata menjadi upaya pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola secara maksimal pesona dari wisata serta objek yang ada di daerah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terus berupaya dalam pengoptimalan pengembangan sector pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat dua dimensi dalam pembangunan pariwisata ialah ekonomi dan

sosial budaya. Dalam dimensi ekonomi, upaya yang dilakukan adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan daya saing masyarakat. Seiring dengan berkembangnya keadaan negara dan keadaan politik dan keamanan dalam negeri saat ini, maka pembangunan di sektor pariwisata diharapkan dapat memulihkan citra pariwisata bagi nasional serta daerah sebagai tempat tujuan berwisata oleh wisatawan dengan kewanibak dan kenyamanan yang terjamin. Dasar hukum yang kuat seperti Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) dibuat untuk mempromosikan pengembangan pariwisata daerah melalui atraksi wisata. Kedua, dari segi sosial, pendekatan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional adalah memelihara nilai-nilai budaya masyarakat, pelestarian alam, perlindungan lingkungan, dan peningkatan rasa cinta dan bangga terhadap kampung halaman.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang berkembang secara baik pada pertumbuhan ekonomi daerahnya. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong produksi di Provinsi Jawa Tengah bidang pariwisata berperan konsekuensial, sehingga kegiatan pariwisata terhadap perekonomian Jawa Tengah berdampak pada pengeluaran wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Keberadaan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah sebagai *Central Gravity* di Indonesia membuka peluang untuk menjadikan Provinsi Jawa Tengah dengan beraneka ragam daya tarik wisata secara alami maupun buatan sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia. Perkembangan potensi wilayah di setiap daerah di Jawa Tengah akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

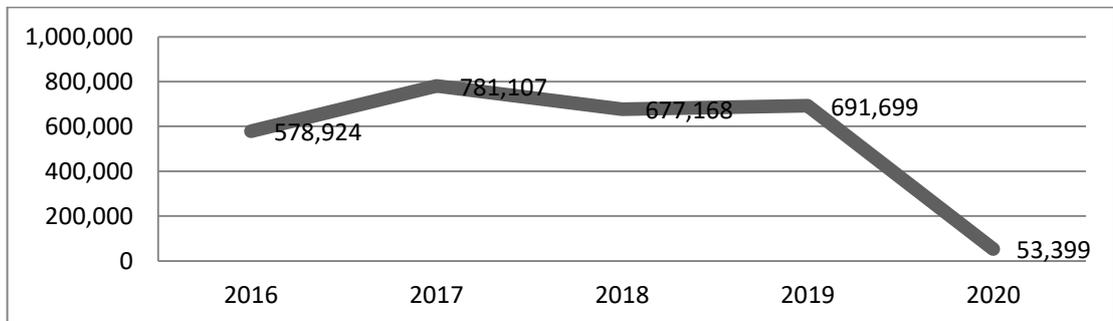
**Gambar 1. 1 Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun 2016-2020 (orang)**



*Sumber : disporapar.jatengprov.go.id*

Bersumber pada data Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2020 sebanyak 192,6 juta wisatawan, naik dari 49 pada tahun 2016-2019,% dan penurunan pada tahun 2020 sebesar 85 %.

**Gambar 1. 2 Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2016-2020 (orang)**



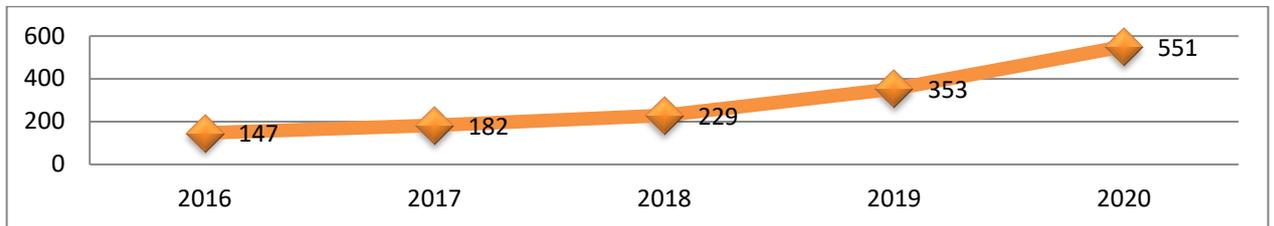
*Sumber : disporapar.jatengprov.go.id*

Bersumber pada data Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, jumlah kunjungan wisman di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2020 sebanyak 2,8 juta wisman, meningkat 24% pada tahun 2016-2019 dan penurunan pada tahun 2020 sebesar 92.%. Penurunan tersebut terjadi sebagai dampak dari COVID-19.

Akibat dampak dari COVID-19 sendiri memberikan banyak perubahan bagi pelaku pariwisata. Kunci utama dalam mempertahankan kegiatan pariwisata selama COVID-19 adalah dengan adanya kemampuan adaptasi dan inovasi. Sehingga terjadi perubahan terhadap tren pariwisata.

Dari sekian banyaknya tren pariwisata, wisata alternatif menjadi pilihan bagi wisatawan saat ini. Wisata alternatif dengan konsep wisata yang lebih ramah terhadap alam dan lebih bersifat lokal sehingga ketika wisatawan mengunjungi lokasi wisata, apa yang mereka dapatkan berbeda dengan lokasi wisata lainnya. Selain itu, wisata alternative bersifat alam menjadi pilihan wisatawan karena banyak wisatawan yang merasa aman untuk tetap berada di luar ruangan daripada di dalam ruangan sehingga mengurangi penyebaran penyakit. Sehingga pelaku wisata mulai mengembangkan pariwisata dengan memunculkan paket-paket wisata yang berfokus pada alam, budaya, dan sesuatu yang menarik serta unik dari daerah tersebut yang disebut sebagai desa wisata. Potensi alam, buatan dan budaya yang diwujudkan desa wisata merupakan wujud kesatuan wisata di Jawa Tengah, bersumber pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah kawasan yang berbeda dengan kearifan masyarakat lokal dan mendapat dukungan di form pertunjukan dan sarana penunjang wisata.

**Gambar 1. 3 Jumlah Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**



*Sumber : disporapar.jatengprov.go.id*

Berdasarkan Gambar 1.3, dalam kurun waktu 5 tahun desa wisata di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 29%. Dimana jumlah pada awal tahun 2016 sebanyak 146 menjadi 551 desa wisata pada tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa minat wisatawan terhadap desa wisata sangatlah besar sehingga berdampak pada pertumbuhan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah.

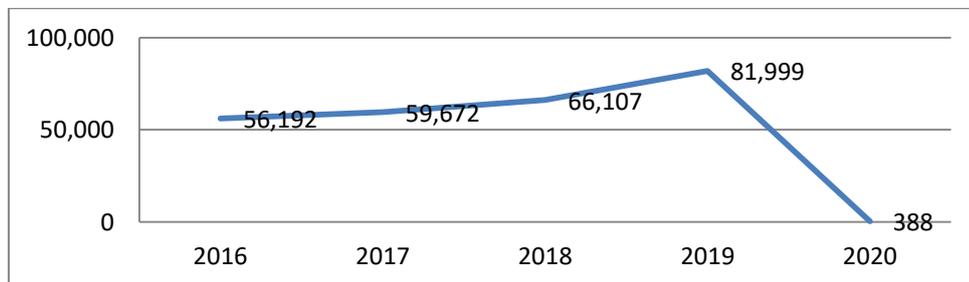
Seiring dengan perkembangan zaman, Kota Semarang dengan potensi wisata yang berlimpah terlebih banyaknya dukungan fasilitas yang menunjang seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, dan lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Kota Semarang sebagai kota dagang berubah menjadi kota wisata. Kota Semarang menawarkan beragam tempat wisata dengan daya tarik dalam kegiatan pariwisata seperti keragaman etnis, keragaman budaya, warisan sejarah, serta tradisi dari kebiasaan dan kehidupan masyarakat Kota Semarang. Hal tersebut memberikan peluang untuk memasarkan produk wisata yang beraneka ragam.

**Tabel 1. 1 Data Wisatawan Kota Semarang Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Wisatawan Mancanegara</b>	<b>Wisatawan Domestik</b>
2016	56.192	4.627.782
2017	59.672	4.964.804
2018	66.107	5.703.282
2019	81.999	7,150,343
2020	388	252.839

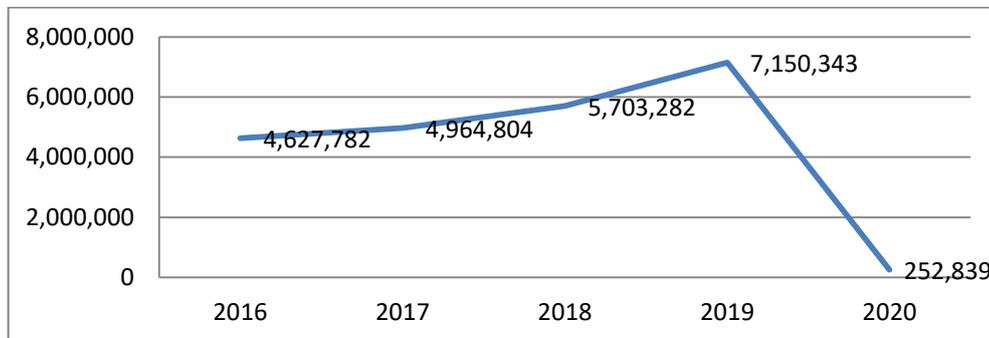
*Sumber: disporapar.jatengprov.go.id*

**Gambar 1. 4 Data Wisatawan Mancanegara Kota Semarang Tahun 2016-2020  
(dalam ribu orang)**



*Sumber: disporapar.jatengprov.go.id*

**Gambar 1. 5 Data Wisatawan Domestik Kota Semarang Tahun 2016-2020 (dalam ribu orang)**



*Sumber: disporapar.jatengprov.go.id*

Berdasarkan tabel 1.1, gambar 1.4, dan gambar 1.5 dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang menjadi salah satu tempat tujuan wisatawan domestic ataupun mancanegara. Meningkatnya jumlah pengunjung merupakan bukti nyata bahwa Kota Semarang merupakan salah satu destinasi wisata yang disukai oleh wisatawan asing maupun domestik. Tujuan wisata di Kota Semarang dengan mengedepankan budaya, alam, dan sesuatu yang unik menjadi minat wisatawan mengunjungi desa wisata. Sehingga desa wisata menjadi salah satu destinisasi wisatawan berkunjung ke Kota Semarang.

Desa wisata memiliki arti suatu kesatuan kehidupan masyarakat di dalam desa tersebut yang tradisi dengan tata cara keunikannya menjadi satu integrasi dengan fasilitas seperti akomodasi, atraksi, dan lainnya (Nuryanti, 1993 dalam Hari Nalayani, 2016). Selain itu, menurut Zakaria, Desa Wisata merupakan suatu kawasan desa yang didalamnya terdapat keunikan sehingga dapat dijadikan daerah tujuan wisata. Desa wisata di Kota Semarang merupakan desa wisata terbaik bagi wisatawan asing dan domestik. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang No. 556/407 tahun 2012 Kota Semarang memiliki 3 desa wisata yang berada di 2 kecamatan, yaitu Desa

Wisata Nongkosawit dan Desa Wisata Kandri terletak di Kecamatan Gunung Pati dan Desa Wisata Wonolopo yang terletak di Kecamatan Mijen. Diantara 3 desa wisata yang sedang dikembangkan, desa wisata yang paling maju adalah Desa Wisata Kandri dengan jumlah kunjungan tahun 2018 sebanyak 169 ribu orang. (Abdul Mughis, 2019). Selanjutnya adalah Desa Wisata Wonolopo dengan 1500 pengunjung per minggu (Kelompok sadar wisata Wonolopo, Januari 2016).

Seiring dengan perkembangan wisata khususnya desa wisata di Kota Semarang, Desa Wisata Nongkosawit masih terdengar kurang familiar untuk wisatawan dan masyarakat di Kota Semarang. Sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Wisata Nongkosawit masih kalah populer dibandingkan dengan Desa Wisata Kandri dan Desa Wisata Wonolopo. Pada tahun 2020, Kepala Kebudayaan dan Pariwisata meluncurkan rencana pengembangan Desa Wisata Nongkosawit secara virtual sebagai upaya Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kearifan lokal yang ada, serta rencana untuk menjadikan Desa Wisata Nongkosawit menjadi wisata unggulan di Kota Semarang.

Dalam perencanaan pengembangan wisata terdapat tiga pendekatan. Pertama adalah seluruh pihak ikut andil dalam pembuatan rencana dan pengembangan wisata wajib dilibatkan dengan cara praktis ataupun teoritis yang disebut dengan pendekatan *participatory planning*. Kedua adalah diperlukannya karakteristik produk dan budaya serta pendekatan potensi yang ada guna mendukung pengembangan dan keberlanjutannya pengelolaan wisata. Yang ketiga adalah masyarakat secara individu maupun kelompok diberikan kesempatan untuk terlibat dan mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan atau dapat disebut dengan pendekatan

pemberdayaan masyarakat (Sastrayuda, 2016). Sehingga dalam pembentukan desa wisata sendiri memiliki kegunaan dalam pemberdayaan masyarakat yang dimana sebagai aktor yang berperan secara langsung dalam mempersiapkan dan meningkatkan pesona dan potensi wisata di daerahnya. Serta memiliki tujuan untuk meningkatkan peran dan minat masyarakat serta *stakeholders* yang lain dalam pembangunan sector pariwisata untuk meningkatkan kualitas perkembangan wisata di daerah tersebut.

Dari ketiga pendekatan tersebut, pengembangan Desa Wisata Nongkosawit dapat dikatakan masih belum berkembang dengan baik atau terkesan lambat seperti desa wisata yang lain diduga karena antar *stakeholders* belum optimal. *Stakeholders* menjadi peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Handayani & Warsono, 2017). Selain itu menurut Hertifah (2003) dalam (Elista et al., 2020), *stakeholders* adalah pribadi ataupun gabungan beberapa orang atau instansi yang memiliki keabsahan dalam membangun suatu program bersama. Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, peran *stakeholders* salah satunya adalah membuat kebijakan serta perencanaan yang sistematis seperti penyediaan dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan pariwisata dan upaya untuk peningkatan kualitas tenaga kerja di bidang pariwisata.

Keterlibatan *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata sebagai actor utama akan dikatakan berhasil apabila memprioritaskan diawali dengan proses melakukan sosialisasi, melakukan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan melakukan evaluasi. Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit, peran pemangku kepentingan merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata Nonkosawit. Permasalahan pertama yang terjadi

adalah permasalahan pada kelompok sadar wisata. Pemahaman tentang desa wisata antar anggota berbeda sehingga menimbulkan kecemburuan dan mengurangi kekompakan antar anggota. Kelompok sadar wisata yang tidak melibatkan masyarakat sekitar serta tidak ada keinginan untuk regenerasi struktur anggota. POKDARWIS sendiri juga tidak melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang menyangkut pengembangan Desa Wisata Nongkosawit dan kurang membimbing masyarakat sekitar (Putri & Yuniningsih, 2019).

Selain itu, permasalahan juga terjadi dengan masyarakat yang ada di Nongkosawit. Partisipasi masyarakat lokal yang rendah dan kesadaran masyarakat setempat akan desa wisata yang ada di daerahnya (Yulianti & Suwandono, 2016). Selanjutnya masyarakat juga masih belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama guna pengembangan Desa Wisata Nongkosawit (Putri & Yuniningsih, 2019). Menurut (Napitupulu et al., 2020), partisipasi merupakan suatu hal yang berpengaruh dalam program sehingga program bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Peran masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan harus mampu menciptakan suasana yang nyaman dan menjadikan kawasan sebagai tempat eksistensi serta mengajak dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif membantu membangun pariwisata untuk kebaikan masyarakat (Sulastri, 2017). Selain bentuk partisipasi dari masyarakat yang kurang masyarakat juga masih belum paham dan kurang informasi terkait Desa Wisata Nongkosawit. Sehingga dukungan dari masyarakat masih kurang karena belum adanya kesadaran dari masyarakatnya.

Dalam pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari sektor swasta dengan peran yang mendukung sarana pariwisata. Ada banyak fasilitas pendukung yang dibutuhkan pariwisata seperti tempat makan, akomodasi, biro perjalanan, transportasi dan lain-lain. Diperlukannya sektor swasta karena dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan pihak yang mendukung dan menyediakan sarana dan prasarana pariwisata, seperti transportasi, biro perjalanan, tempat makan, akomodasi, dan banyak lain yang berkaitan dengan pariwisata. (Yoeti, 1996 dalam Amalyah et al., 2016). Selain itu, dalam pelaksanaan serta pembangunan Desa Wisata Nongkosawit sendiri kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dengan pihak swasta tidak secara langsung ditengahi oleh masyarakat di Nongkosawit dan panitia perencanaan pembangunan Desa Wisata Nongkosawit (Yuliati & Suwandono, 2016). Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit masih belum ada sektor privat yang mendukung pariwisata dan memiliki kepentingan dalam pengembangan pariwisata.

Menurut ((Wati, 2016), sumberdaya dapat menjadi actor penentu dalam pengembangan suatu program. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan upaya dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit seperti pembangunan infrastruktur dengan pembangunan jalan atau akses menuju desa wisata, lampu penerangan jalan, mengadakan pelatihan-pelatihan anggota PODARWIS guna meningkatkan SDM, serta ikut memfasilitasi kegiatan forum komunikasi desa wisata di Kota Semarang. Akan tetapi, masih ditemukan fasilitas-fasilitas yang belum memadai. Berdasarkan permasalahan di atas dapat dikatakan bahwa peran antar stakeholders di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang masih belum optimal,

sehingga peneliti diharapkan mampu menganalisis peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan identifikasi terkait masalah yang ada, yaitu:

1. Kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat Nongkosawit terkait dengan Desa Wisata Nongkosawit
2. Permasalahan internal kelompok sadar wisata sehingga menghambat pengembangan Desa Wisata Nongkosawit
3. Belum adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit
4. Belum optimalnya peran dari Pemerintah Kota Semarang

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Kegunaan penelitian ini adalah membantu untuk mempelajari suatu permasalahan serta memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang difokuskan dalam pengembangan pariwisata dengan teori tentang peran *stakeholders*.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Dapat digunakan dalam menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan mengenai pengembangan pariwisata

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Pertanyaan	Kontribusi	Teori	Unit Penelitian	Metode	Temuan
1	Tsuraya Annisa Salsabila, R. Slamet Santoso . (2018). Jurnal Kebijakan Publik	Analisis <i>Stakeholders</i> (Aktor Kebijakan) Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsong Di	Bagaimana analisis <i>stakeholders</i> dan Jejaring Kebijakan dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsong di	Menganalisis efektivitas peran <i>stakeholders</i> dan hubungan <i>stakeholders</i> dalam pengembangan obyek wisata Candi	Formulasi Kebijakan Publik Efektivitas Peran Jejaring Kebijakan Pengembangan Pariwisata	Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan wawancara, dokument	Koneksi menghasilkan jaringan kebijakan. Hasil jaringan kebijakan membantu setiap pemangku kepentingan untuk

	dan Manaje men Vol.07 No.02	Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang ?	Gedongsong o..			asi, dan observasi .	berkoordinasi dan saling mendukung sehingga tidak terjadi miskonsepsi dan tumpang tindih.
2	Fitri Handayani, Hardi Warsono. (2017). Jurnal Kebijakan Publik dan	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten	Bagaimana identifikasi dan analisis stakeholders berdasarkan pengaruh dan kepentingannya?	Identifikasi dan analisis terkait <i>stakeholders</i> dengan melakukan pemetaan berdasarkan kepentingan dan	Stakeholders Peran Stakeholders Kemitraan	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Badan Pengelola Pantai	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata pantai Karang Jahe melibatkan banyak

	Manajemen	Rembang	<p>Bagaimana peran dari setiap <i>stakeholders</i> dalam usahanya mengembangkan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang? Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi para <i>stakeholders</i> dalam usaha mengembangkan objek wisata</p>	<p>pengaruh. Deskripsi peran masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. Identifikasi faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang</p>		<p>Karang Jahe (BP KJB)</p>	<p><i>stakeholders</i>. Peran yang dijalankan oleh masing-masing pemangku kepentingan meliputi pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana dan akselerator. Faktor penghambat peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan</p>
--	-----------	---------	---	--	--	-----------------------------	---

			Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang?	Jahe di Kabupaten Rembang.				pariwisata Pantai Karang Jahe adalah keterbatasan lahan, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, pola pikir, regulasi, kegiatan promosi, dan kerjasama antar stakeholders.
3	Muhammad Bibin, Yon Vitner, & Zulhamsyah	Analisis pemangku kepentingan dalam	Bagaimana partisipasi stakeholders dalam	Untuk memahami partisipasi stakeholders	Analisis pemangku kepentingan Process	.Kepala Dinas Pariwisata Kota Palopo	Metode snowball sampling digunakan	Hasil penelitian mengatakan bahwa pariwisata

	<p>Imran. (2018). Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 31, Issues 1</p>	<p>pengembangan wisata bahari Pantai Labombo secara berkelanjutan di Kota Palopo</p>	<p>pengembangan wisata bahari di Pantai Labombo?</p>	<p>dalam pengembangan wisata bahari di Pantai Labombo.</p>	<p>Hierarchy Analysis (PHA) Pendukung layanan turis Perencanaan dan pengelolaan kawasan pariwisata</p>	<p>1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo 2. Kepala Badan Tata Ruang Kota Palopo 3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo 4. Kepala Bapedda Kota Palopo 5. Ketua LSM</p>	<p>untuk menentukan sumber informan, berpindah dari satu informan ke informan lainnya.</p>	<p>Kantor Kota Palopo adalah instansi yang membidangi urusan pemerintahan dan pengelolaan pariwisata pembangunan di Kota Palopo, serta salah satu pemain kunci yang dapat sepenuhnya melib Turis Pemkot Palopo juga sangat berhati-hati dalam</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	---

						Wallacea Lurah Salokoe, Ketua Tur Grup Kesadaran tentang ikatan pemuda pencipta alam dan lingkungan Kota Palopo Tokoh masyarakat.		berkomunikasi dan memantau keberadaannya kelompok pemuda pecinta alam dan lingkungan di Kota Palopo) dan komunitas, karena minat dan pengaruh mereka dapat berubah dari waktu ke waktu
4	Demetris V, Michael C, Elisa G,	Pembangunan Berkelanjutan dalam	Bagaimana model bisnis dalam pariwisata	Berdasarkan teori pemangku kepentingan,	Manajemen Pengetahuan Pembangunan	Informan dari perusahaan	Pendekatan kualitatif dipilih	Sebagai mekanisme untuk

<p>Francesca S (2021). Jurnal Perhotelan &amp; Penelitian Pariwisata.</p>	<p>Pariwisata: Analisis Pemangku Kepentingan dari Wilayah Langhe</p>	<p>yang digunakan di wilayah Langhe Italia selaras dengan pembangunan berkelanjutan?</p>	<p>artikel ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana model bisnis di bidang pariwisata yang digunakan di wilayah Langhe Italia diselaraskan dengan agenda untuk pembangunan berkelanjutan.</p>	<p>Berkelanjutan di Pariwisata Pendekatan Teori Pemangku Kepentingan</p>	<p>makanan, restoran, agrowisata, pedagang grosir, perusahaan ekspor, Fasilitas akomodasi (hotel dan bed and breakfast), Perusahaan perjalanan (agen perjalanan, perusahaan transportasi, pemandu</p>	<p>sebagai metodologi penelitian, untuk melihat lebih dalam tentang pola pikir pewawancara.</p>	<p>mengembangkan keberlanjutan melalui holistik pariwisata, artikel ini merupakan salah satu yang pertama upaya untuk memperkenalkan teori keterlibatan pemangku kepentingan di dunia nyata domain. Yang terpenting, penelitian ini</p>
---	--	--	--	--	---	---	---

						wisata) . Penyedia bahan baku dan jasa . Dinas pariwisata daerah . Lembaga budaya (holist, perpustakaan) . Penduduk asli Langhe.		mulai menjelaskan peran kompleks itu pemangku kepentingan di holist pariwisata bermain dalam pembangunan berkelanjutan, dengan contoh wilayah Langhe.
5	Otilie Geiger. (2017)	Dampak hubungan pemangku kepentingan	Bagaimana secara keseluruhan keberlanjutan	Untuk mengetahui secara keseluruhan	Teori pemangku kepentingan Keterlibatan pemangku	. Administrasi / penjaga taman nasional	Studi kasus ini menggunakan desain	Sampai pada kesimpulan bahwa kurangnya

		<p>pada keberlanjutan pembangunan pariwisata</p>	<p>pembangunan pariwisata dalam suatu destinasi dipengaruhi oleh hubungan antara keduanya kelompok pemangku kepentingan di dalamnya?</p>	<p>keberlanjutan pembangunan pariwisata dalam suatu destinasi dipengaruhi oleh hubungan antara keduanya kelompok pemangku kepentingan di dalamnya</p>	<p>kepentingan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan</p>	<p>Masyarakat sekitar Orangutan Foundation International (OFI) Friends of the National Park Foundation (FNPF) Ogreen DMO Tanjung Puting / Swisscontact Boating, Guiding and Chef</p>	<p>penelitian kualitatif berdasarkan kerangka teori a Pendekatan Grounded.</p>	<p>kepemimpinan yang kompeten dalam proses pembangunan menghasilkan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang antara para pemangku kepentingan. Sebagai Akibatnya, tidak semua pemangku kepentingan dapat memberikan</p>
--	--	--	--	---	---	--	--	---

						Associations 3. Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Kumai wilayah 4. Rimba Ecolodge (REL)		kontribusi yang sama pada proses, sehingga secara efektif mencegah a pembangunan pariwisata yang berkelanjutan secara holistic.
6.	Amanda Elista, Kismartini, dan Amni Zarkasyi Rahman	Peran Stakeholders dalam Program Pencegahan Kekerasan	Bagaimana peran <i>stakeholders</i> dalam program pencegahan kekerasan dalam	Untuk mengetahui kurangnya angka KDRT dengan menganalisis	1. Teori <i>Stakeholders</i>	1. DP3A Semarang 2. PPT Seruni Semarang	Metode kualitatif deskriptif.	Pada pelaksanaan peran tersebut ditemukan penyebab masih tingginya angka

	(2020)	dalam Rumah Tangga di Kota Semarang	rumah tangga di Kota Semarang?	peran <i>stakeholders</i> .		<p>3. Dinas Pendidikan Semarang</p> <p>4. Dinas Sosial Semarang</p> <p>5. Tim Penggerak PKK Semarang</p> <p>6. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranta</p> <p>7. APSAI</p>	<p>KDRT karena faktor ekonomi, budaya patriarki, Kota Semarang sebagai kota yang kompleks</p> <p>b) stakeholder lembaga masyarakat sebagai fasilitator &amp; implementor ditemukan penyebab tingginya angka KDRT karena faktor kesadaran</p>
--	--------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	---	--

						Semarang 8. Bank Mandiri Semarang		warga Kota Semarang untuk melapor c) stakeholder swasta sebagai akselerator telah menjalankan perannya dengan baik melalui CSR.
7.	Firman Saputra Napitupulu, Ari Subowo, Teuku Afrizal3	Peran Stakeholders Dalam Pengentasan Kemiskinan Kelompok Nelayan Di Kelurahan	Bagaimana peran dari <i>stakeholders</i> dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di	Identifikasi dengan meneliti terkait jaringan dari peran dan <i>stakeholders</i> yang terkait dalam program pengetasan	1. <i>Stakeholders</i> 3. Pemetaan <i>Stakeholders</i>	1. Dinas Sosial Kota Semarang 2. Kec.Semara ng Utara 3.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa:	Terdapat empat jaringan pemangku kepentingan dengan peran yang berbeda untuk setiap pemangku

		Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	kemiskinan.		Kel.Tanjung Mas  4. Organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia  5. Forum KUB Tambak Lorok  6. Ketua RT 01/ RW 15  7. Masyarakat	observasi, wawancara dan dokumentasi	kepentingan. pengobatan, proses pembuktian kasus kekerasan yang sulit dilakukan, dan kuatnya budaya patriarki di masyarakat.
--	--	--	--	-------------	--	---	---	---

### **1.5.2 Administrasi Publik**

Pendapat A Dunsire dalam (Keban, 2014) terkait dengan administrasi sebagai bentuk kegiatan pemerintah dalam mengarahkan, menganalisis, mengimplementasikan, memberikan hasil keputusan, mempertimbangkan hasil kebijakan secara teoritik dan akademis kepada publik sebagai suatu bentuk pelayanan kepada publik. Pendapat Chandler dan Plano dalam Keban (2014) mengenai administrasi publik yaitu pengorganisasian serta pengkoordinasian sumber daya dan personel publik yang diproses guna melakukan formulasi, implementasi, dan pengelolaan keputusan dalam kebijakan publik. Dalam studi literturnya, McCurdy dalam Keban (2014) mengemukakan bahwa dalam melakukan fungsi negara, cara yang dianggap prinsipil dalam memimpin dan memerintah suatu negara melihat administrasi publik dapat sebagai suatu proses politik.

Pemerintah memiliki peran sebagai penguasa atau regulator aktif dalam mengambil suatu keputusan dan langkah yang dirasa penting dan baik untuk masyarakat serta diharapkan masyarakat untuk mengikuti aturan yang berlaku atau perintah dari pemerintah dapat diistilahkan sebagai administrasi publik. Dijalankannya fungsi pelayanan dan peraturan berdasarkan perintah dari lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif dengan memanfaatkan fungsi teori dan proses manajemen terhadap masyarakat adalah pengertian administrasi publik (Rosenbloom dalam Keban (2014). Dalam kegiatan pemerintah seperti eksekutif, legislative, dan yudikatif dikombinasi dan ditekankannya pada aspek proses instusional. Administrasi publik memiliki hakekat yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

memiliki kaitan dengan administrasi publik, formulasi dan implementasi kebijakan publik berkaitan dengan administrasi publik, pengembanan tugas oleh pemerintah dan penyelesaian masalah berkaitan dengan administrasi publik, dan terjadinya overlapping antara administrasi publik dengan administrasi swasta meskipun berbeda.

### **1.5.3 Kebijakan Publik**

Kebijakan dengan arti sebagai politik yang diimplikasikan pada langsung regulasi yang memiliki kaitan dengan pengelolaan dan distribusi sumber daya dan keuangan untuk kepentingan publik, yaitu masyarakat yang berbentuk sebuah keputusan berdasarkan berbagai gagasan, ide, pendapat, dan konsepsi. Menurut pendapat dari (Hogwood dan Gunn dalam Edi Suharto (2007 : 4)), kebijakan publik merupakan pencapaian suatu hasil pemecahan masalah oleh pemerintah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip oleh (Winarno, 2002:17) berpendapat bahwa kebijakan publik menduga perencanaan terkait akibat dan kondisi awal yang.

Terdapat dua karakteristik yang kebijakan publik menurut pendapat dari Nugroho yaitu arti dari kebijakan publik ialah dibuatnya hal-hal dengan arti yang mudah dipahami serta dilakukan untuk mencapai tujuan nasional dan bersama dan arti dari kebijakan publik ialah dibuatnya hal-hal dengan arti yang mudah untuk diukur sebab dalam melalui kemajuan pencapaian cita-cita diperlukannya kejelasan ukuran.

Tujuan yang jelas dalam mengambil suatu keputusan serta terdiri atas seluruh tindakan dari pemerintah dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah agar terlihat semua keputusan dibuat untuk kepentingan bersama (Dye dalam Pasolong (2008).

Kebijakan publik ialah peraturan yang dibuat pemerintah dan sifatnya mengikat dan memaksa guna memecahkan masalah-masalah publik serta kepentingan publik dengan adanya tujuan yang tertentu dan jelas dan diterapkan kepada masyarakat.

#### **1.5.4 Stakeholders**

*Stakeholders* dapat diartikan sebagai salah satu pendukung oleh individu maupun kelompok yang sangat diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup serta menjamin kesejahteraan suatu instansi atau organisasi (Salsabila & Santoso, 2016). Selain itu dalam penelitian Freedman, dalam mencapai suatu tujuan atau program dipengaruhi serta mempengaruhi kelompok ataupun individu itu sendiri (Freedman, 1975 dalam Oktavia & Saharuddin, 2015). Pemangku kepentingan juga dapat dikenal sebagai individu ganda dengan kepentingan dan keputusan yang dapat ditentukan secara individu atau kelompok, and dapat dikenal sebagai pemangku kepentingan jika mereka memiliki karakteristik seperti legitimasi, kepentingan, serta kekuatan dalam keberadaan program (Budiman et al, 2008 dalam Oktavia & Saharuddin, 2015). *Stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok (Maryono et al.2005 dalam Yosevita, 2015), antara lain:

a. *Stakeholders* primer

Pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dalam kegiatan yang sudah ditentukan dan terkena langsung dampak positif maupun dampak negatif dari rencana kegiatan tersebut. Akibatnya, dalam tahapan-tahapan kegiatan, para pemangku kepentingan harus dikonsultasikan terlebih dahulu karena mereka memiliki kepentingan dan pengaruh yang signifikan.

b. *Stakeholders* kunci

*Stakeholders* kunci memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan, yaitu sekelompok orang dengan kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan.

c. *Stakeholders* sekunder atau pendukung

Dalam pengembangan pariwisata, tidak lupa stakeholder pendukung yang kepentingannya tidak terkait langsung dengan konsep, akan tetapi mempunyai dampak dan kepedulian yang tinggi terhadap proses penyusunan rencana. Dalam hal ini, stakeholder pendukung dapat dianggap sebagai pihak yang memfasilitasi proses pengembangan suatu kegiatan dan mempengaruhi pengambilan keputusan, dan dapat dikategorikan sebagai pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, peneliti atau investor.

*Stakeholders* sendiri diklasifikasikan berdasarkan perannya dalam suatu program (Nugroho et al., 2014), antara lain:

- a. *Policy creator* merupakan *stakeholders* yang memiliki peran untuk mengambil keputusan dan menentukan suatu kebijakan.
- b. Koordinator merupakan *stakeholders* yang memiliki peran untuk berkoordinasi antar *stakeholder* yang ikut berpartisipasi.
- c. Fasilitator merupakan *stakeholders* yang memiliki peran sebagai fasilitator dan mencukupi kebutuhan objek yang dituju.

- d. Implementor merupakan *stakeholders* yang berperan dalam melaksanakan kebijakan yang di dalam kebijakan tersebut terdapat objek yang dituju.
- e. Akselerator merupakan *stakeholders* yang berperan seperti kontribusi dan menetapkan waktu dengan tujuan agar program yang dijalankan tepat dan sesuai sasaran serta waktu pencapaiannya lebih cepat

*Stakeholders* dapat diartikan sebagai individu dan kelompok yang memiliki kesamaan tujuan dan memiliki peran masing-masing yang sifatnya penting guna keberhasilan tujuan atau program yang ingin dicapai. Peran tersebut dibagi menjadi *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselator.

### **1.5.5 Peran**

Peran merupakan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan seseorang dalam bertindak untuk merealisasikan tujuan yang ditetapkan secara sendiri maupun bersama sebelumnya sehingga perilaku yang ditunjukkan mencerminkan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini arti dari peran sendiri dalam suatu pencapaian tujuan yang ditetapkan kelompok maupun pribadi harus terlibat dan ikut serta secara aktif dan dilandasi oleh kemampuan yang memadai sehingga terwujudnya tujuan dengan rasa tanggungjawab yang diikuti dengan keinginan dan kesadaran akan menjalankan kegiatan tersebut (Rafid, 2009 dalam Salsabila & Santoso, 2016). Peran juga merupakan perilaku yang diharapkan seseorang saat menduduki status tertentu (Paul B. Horton, 1999).

Sutarto, 2009 mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen peran (LANTAEDA et al., 2017)) yaitu:

- a. Pengertian dari konsepsi peran itu sendiri adalah *trust* atau kepercayaan yang dimiliki seseorang tentang situasi dan kondisi yang akan dilakukan seseorang tersebut.
- b. Pengertian dari harapan peran adalah keinginan atau *hope* terhadap seseorang atau pihak lain yang memiliki kedudukan tertentu dan bagaimana mereka bertindak secara benar.
- c. Pengertian pelaksanaan peran adalah suatu bentuk perilaku yang sesuai dengan bagian dan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak lain sehingga kegiatan atau proyek bergerak ke arah yang telah ditentukan.
- d. Peran merupakan bentuk tindakan secara sadar dan melibatkan diri pada suatu kegiatan serta melibatkan banyak *stakeholders* dengan peran yang berbeda dalam rangka mendukung kegiatan tersebut .

#### **1.5.6 Pariwisata**

Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan mendefinisikan bahwa pariwisata merupakan bentuk kegiatan wisata dengan dukungan dari berbagai macam kegiatan wisata dan berbagai fasilitas yang menunjang keberjalanannya wisata serta pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Selain itu, menurut Devy, dkk (2017) dalam (Pebriyanti et al., 2020) pariwisata adalah suatu kesatuan dari elemen-elemen terkait yang didalamnya terdiri dari wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industry, dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan tahapan dalam

langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan seta tujuan pembangunan (Pebriyanti et al., 2020).

### **1.5.7 Kemitraan**

Kemitraan atau *partnership* adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan maksud untuk tujuan yang sama. Kemitraan adalah korelasi yang terbentuk antar pemerintah, masyarakat, dan/atau privat untuk pencapaian tujuan tertentu dengan prinsip kesetaraan, kepercayaan, dan kemandirian (Sumarto,116 dalam Melyanti, 2014). Dalam bentuk kegiatan kerjasama atau kemitraan harus sama-sama menyadari pentingnya poin dari kerjasama itu sendiri dengan memberikan manfaat antar satu dengan lainnya, kedua pihak mendapatkan manfaatnya, sehingga kedua belah pihak tersebut akan optimal dalam mencapai tujuannya. (Handayani & Warsono, 2017).

Kemitraan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh individu, antar pihak atau antar kelompok dimana tujuan bersama adalah untuk mencapai hasil yang maksimal.

### **1.5.8 Collaborative Governance**

*Collaborative goverance* merupakan sistem pemerintahan yang memiliki struktur kompleks yang berimplikasi pada kepraktisan sebagai mekanisme tata kelola (Huxham et al., 2000). *Collaborative governance* adalah cara baru untuk memungkinkan pembuat kebijakan yang beragam untuk berdiskusi, mencapai kesepakatan, dan melibatkan aktor non-negara sebagai proses pembuatan kebijakan kolektif yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan mengelola program atau aset publik (Ansell &

Gash, 2008). Dalam hal ini *collaborative governance* lebih menekankan pada 6 kriteria (Ansell & Gash, 2007 dalam (Dewi, 2019) yaitu:

1. Lembaga publik atau lembaga berwenang yang memprakarsai forum
2. Pihak swasta merupakan peserta forum
3. Terlibatnya peran peserta secara langsung dalam pengambilan suatu keputusan
4. Dilakukan secara terorganisir
5. Forum diciptakan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan adanya tujuan
6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan dan manajemen publik

Terdapat 8 indikator yang dapat menilai keberhasilan atau kegagalan oleh pemerintah dimana proses kolaboratif diawali dengan melakukan dialog tatap muka (Deseve dalam Indriani et al., 2021), yaitu :

1. Struktur Jaringan
2. Komitmen untuk tujuan bersama
3. Tata Kelola
4. Kepercayaan antar *stakeholders*
5. Tanggung jawab
6. Berbagi informasi
7. Akses menuju sumber daya
8. Akses menuju otoritas

*Collaborative Governance* merupakan keterlibatan sektor publik dengan swasta dan masyarakat atau *stakeholders* terkait untuk memberikan arahan dalam kepentingan masing-masing guna mencapai tujuan bersama.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Untuk mengetahui peran, peneliti melakukan identifikasi pada setiap *stakeholders* yang terkait. Adapun peran *stakeholders* ini dideskripsikan melalui beberapa peran yang dilihat sebagai :

1. *Policy Creator* : *Stakeholders* yang memiliki peran sebagai penentu kebijakan serta pengambil keputusan.
2. Koordinator : *Stakeholders* yang memiliki peran sebagai koordinator antar *stakeholders* yang ikut berpartisipasi.
3. Fasilitator : *Stakeholders* yang memiliki peran memfasilitasi serta mencukupi kebutuhan pihak lain yang terlibat (kelompok sasaran).
4. Implementor : *Stakeholders* yang memiliki peran melaksanakan kebijakan yang dimana melibatkan kelompok sasaran.
5. Akselerator : *Stakeholders* yang memiliki peran sebagai pihak yang berkontribusi dalam memudahkan pelaksanaan program atau kegiatan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### 1. Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong dan penghambat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal.

### **1.7 Argumen Penelitian**

Argumen penelitian berisikan tentang jawaban atas perumusan masalah berdasarkan teori-teori, serta dibangun berdasarkan kerangka teoritis. Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit yang masih dikatakan lambat dikarenakan peran *stakeholders* masih belum optimal. Desa Wisata Nongkosawit sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang di tahun 2012 dan masih belum berkembang secara optimal seperti dua desa wisata yang lain yaitu Desa Wisata Kandri dan Wonolopo. *Stakeholders* berperan sangat penting guna mengetahui perkembangan Desa Wisata Nongkosawit. Peran pemerintah terkait pengembangan Desa Wisata Nongkosawit masih belum optimal karena output yang ada di masyarakat dan sekitarnya masih tidak terlihat. Peran POKDARWIS selaku pengelola wisata juga masih belum optimal dilihat dari kurangnya komunikasi antar anggota maupun kepada masyarakat Nongkosawit sendiri. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya peran *stakeholders* di Desa Wisata Nongkosawit dalam pengembangan pariwisatanya.

### **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Metode kualitatif adalah proses peneliti yang melakukan penelitian terhadap suatu kejadian social dan masalah yang ada dengan menggunakan metode yang dipahami. (Creswell, 2010). Peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian dirangkum dalam deskripsi spesifik, yang merinci temuan dalam bentuk kata, kalimat, dan bahasa, serta menggunakan metode yang beragam.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian dalam menetapkan tujuan dan objek akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti melakukan penelitian di Desa Wisata Nongkosawit, Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, subjek peneliti adalah individu atau kelompok yang memiliki informasi akurat yang dapat ditelusuri kembali ke fakta-fakta di lapangan. Teknik *purposive sampling* digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampel secara sengaja. Serta teknik *snowball sampling* dimana informan pertama adalah Dinas Pariwisata Kota Semarang. Dan akan berlanjut ke informan selanjutnya yaitu POKDARWIS Desa Wisata Nongkosawit, serta masyarakat sekitar Desa Nongkosawit.

### **1.8.4 Jenis Data**

Dalam penelitian kualitatif ini, jenis data yang digunakan peneliti adalah data yang berupa rangkaian kata atau frase yang dapat menggambarkan peristiwa atau fenomena yang ditemukan dalam penelitian, bukan berupa angka atau angka.

### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek yang memiliki bukti berupa data untuk didapatkan dalam penelitian, dan peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

#### **1. Sumber data primer**

Pengumpulan secara langsung yang berasal dari akar permasalahan atau akar pertama disebut dengan sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data primer yang adalah Dinas Pariwisata Kota Semarang, POKDARWIS Desa Wisata Nongkosawit, dan masyarakat Desa Nongkosawit.

#### **2. Sumber data sekunder**

Data pendukung yang dikumpulkan berasal dari sumber pertama oleh peneliti, yang disebut sumber data sekunder, dengan susunan data berupa arsip atau dokumen. Pada penelitian ini tinjauan pustaka, dokumen, penelitian terdahulu dan jurnal merupakan sumber data sekunder.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

#### **1. Wawancara**

Peneliti menyusun pertanyaan secara urut dan mengajukan pertanyaan kepada responden secara terstruktur sehingga dalam pengumpulan data terlihat lebih rapi dan

lengkap sehingga memudahkan peneliti dalam mencari dan mengolah data. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada Kepala Bagian Kelembagaan (Desa Wisata), Ketua POKDARWIS, dan Masyarakat sekitar Desa Wisata Nongkosawit.

## 2. Observasi

Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang guna melihat bagaimana keadaan di lapangan.

## 3. Dokumentasi

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data pendukung berbentuk arsip atau dokumen yang dikaji dan diteliti. Hasil wawancara akan dikatakan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto ataupun karya tulis akademik.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan Data, upaya peneliti untuk mendapatkan kebutuhan data yang sesuai dengan hasil pengambilan suatu data,
2. Reduksi Data, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari pola dan tema dengan merangkum hal-hal penting. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan karena data yang digunakan sangat banyak.
3. Penyajian Data, dalam agian data yang direduksi oleh peneliti akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, tabel, grafik, dan lain sebagainya untuk mempermudah proses peneliti dan pembaca dalam memahami suatu permasalahan yang diteliti dan langkah-langkah menyelesaikan permasalahan.

4. Penarikan Kesimpulan, dalam penelitian ini akan bersifat temporary atau sementara karena didalam penelitian akan ditemukan bukti yang lebih.

#### **1.8.8 Kualitas Data**

Terkait dengan pengembangan desa wisata Nongkosawit, triangulasi sumber data untuk menguji keabsahan yang didapatkan dari pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang terkait digunakan peneliti untuk memastikan kualitas data.